

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Rury Angelita Putri

NPP. 30.0431

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Keuangan Publik

Email: ruryangel06@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riswati, S.Pd., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Financial regional performance is an assessment of the objective of the results of work in a region in exploring and managing local financial resources so that it can assess the ability of the region to manage regional autonomy. Regional financial performance is also an important factor in improving regional government performance. **Purpose:** This study analyzes the financial budget of the Bengkulu City Government for the 2018-2021 fiscal year, looking at the factors inhibiting financial performance in improving regional financial performance, as well as the efforts made to improve the financial performance of the Bengkulu City regional gover. **Method:** The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The data used in this study are the Budget Realization Report of the City of Bengkulu as secondary data and the results of interviews as primary data. Data collection was carried out using unstructured interview techniques and documentation techniques. **Result:** The results of the research that has been done indicate that in general the financial performance of the Bengkulu City area is still relatively low, this can be seen from the several calculations of the financial ratios used. In addition, the implementation of the financial performance has several inhibiting factors that become an obstacle in regional financial management. **Conclusion:** Suggestions that can be given are rotating employees, and optimizing the intensification and extensification of sources of income according to the authority and original potential of the existing regions.

Keywords: *Financial regional performance, Financial ratio*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan daerah merupakan penilaian terhadap suatu pencapaian hasil kerja pada suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah sehingga dapat menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu tahun anggaran 2018-2021, melihat faktor penghambat kinerja keuangan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

kinerja keuangan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Bengkulu sebagai data sekunder dan hasil wawancara sebagai data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara tidak terstruktur dan teknik dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kota Bengkulu masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari beberapa perhitungan rasio keuangan yang digunakan. Selain itu pelaksanaan kinerja keuangan tersebut memiliki beberapa faktor penghambat sehingga menjadi suatu kendala dalam pengelolaan keuangan daerah. **Kesimpulan:** Hendaknya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu meningkatkan PAD agar lebih efisien, melakukan rotasi pegawai, serta mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi asli daerah yang ada.

Kata kunci: Partisipasi; Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, kebijakan desentralisasi merupakan wujud dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Penerapan sistem otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban daerah yang lebih luas untuk mengatur, mengurus, dan membangun daerahnya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah bermaksud agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Diterapkannya sistem otonomi daerah karena terjadi ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Penerapan otonomi daerah yang diikuti desentralisasi fiskal tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan untuk pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya bermaksud memberi wewenang dalam hal pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Menurut Halim (2019) kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah tersebut. Semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, maka menunjukkan semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dalam memenuhi semua kebutuhannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan penilaian terhadap suatu pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Mahmudi (2019:133) laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan memberikan informasi yang sangat bermanfaat guna menilai kinerja keuangan suatu daerah.

Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan ditandai dengan kemampuan daerah mampu mengelola sumber-sumber pendapatannya berupa PAD sedangkan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat hanya untuk mengimbangi kesenjangan fiskal yang terjadi antara daerah dengan pusat ataupun antara daerah satu dengan daerah yang lain, selain itu dana

transfer juga diberikan dalam rangka menutupi kekurangan belanja daerah yang belum dapat dipenuhi salah satunya melalui PAD.

Untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintah daerah antara lain dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menjadi cerminan bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya dengan mengutamakan prinsip efisien namun tetap efektif dalam membangun daerahnya. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan lebih pandai dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kota Bengkulu merupakan Ibukota di Provinsi Bengkulu yang terletak di selatan Pulau Sumatera. Kota Bengkulu merupakan daerah pariwisata yang memiliki wisata alam dan wisata peninggalan sejarah, namun potensi daerah yang dimiliki Kota Bengkulu belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah baik pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan yang sah. Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dana perimbangan diberikan pemerintah pusat salah satunya dalam rangka menutupi kekurangan belanja daerah yang belum dapat dipenuhi melalui PAD. Dana perimbangan yang diberikan sangat mendominasi sehingga menyebabkan terjadi kesenjangan yang sangat signifikan antara pendapatan asli daerah Kota Bengkulu dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah Kota Bengkulu yang merupakan kota wisata masih tergolong rendah dan belum dapat mencapai target yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Kecilnya pendapatan asli daerah Kota Bengkulu mengakibatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat sangat besar. Hal tersebut mengakibatkan belanja daerah Kota Bengkulu dibiayai melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kota Bengkulu saat ini masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam data yang telah ditampilkan sebelumnya yang menunjukkan bahwa PAD Kota Bengkulu belum dapat menutupi belanja daerah. Seharusnya dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat lebih efektif dalam menggali potensi daerah yang dimiliki agar tidak terlalu bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Agus Tri Sulisty (2018) yang berjudul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur*, menggunakan metode campuran dengan mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik. Penelitian Lala Novikasari dan Zulkarnain (2020) dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi*, dengan metode pendekatan kuantitatif deskriptif memberikan hasil bahwa Pemerintah Kota Sukabumi pada tingkat kemampuan daerah tergolong cukup dan pencapaian target tahunan PAD sudah sangat efektif, namun rasio belanja modal masih rendah. Penelitian Riska Omega Fatmawati (2020) dengan judul *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*, dengan metode kuantitatif dan analisis menggunakan statistic, memberikan hasil bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan

DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Novira Sartika (2019) dengan judul *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti*, dengan menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif menunjukkan Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya serta Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Penelitian Kadek Martini dan Dwirandara (2015) dengan judul *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali*, dengan metode Kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda, menunjukkan Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni kinerja keuangan daerah berdasarkan laporan realisasi anggaran, metodenya yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif yang berbeda dengan penelitian dari Agus, Lala dan zukarnain, Triska, Novira. Selain itu Fokus penelitian dari Triska adalah pengaruh Pendapatan Daerah terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan. metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah metode kualitatif deskriptif. Perbedaan dengan penelitian Kadek dan Dwirandara adalah fokus penelitian terdahulu ialah pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah dan menganalisis upaya yang dilakukan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang bersifat pendukung diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait untuk mendapatkan data dan keterangan yang pasti. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen, catatan, dan arsip dari pihak terkait. Dimana dokumen yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bengkulu tahun 2018-2021 yang diperoleh langsung dari BPKAD Kota Bengkulu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Bengkulu

Kinerja Keuangan Daerah Kota Bengkulu dapat dilihat melalui kinerja keuangan daerahnya yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu khususnya pada tahun 2018-2021. Dilihat dari data laporan realisasi anggaran Kota Bengkulu

pada tahun 2018-2021 dana transfer merupakan penyumbang sumber pendapatan daerah terbesar di Kota Bengkulu. Hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Yudi Susanda, S.STP., M.Si selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa: “Kinerja keuangan Kota Bengkulu seperti yang kita ketahui memiliki pendapatan daerah yang tergolong kecil. Pendapatan asli daerah yang merupakan unsur dari pendapatan daerah menyumbangkan dana yang tidak terlalu besar dikarenakan masih banyaknya pekerjaan yang belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah dalam memanfaatkan pendapatan yang sudah ada dan juga pendapatan daerah di Kota Bengkulu ini masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi”.

Pendapatan daerah yang kecil disebabkan dari pengelolaan yang belum optimal dari pemerintah daerah sehingga pendapatan asli daerah yang diterima juga kecil. Kecilnya PAD yang dimiliki Kota Bengkulu ini menyebabkan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi cukup besar. Dana transfer ini digunakan untuk menutupi belanja daerah yang belum dapat ditutupi oleh PAD, sehingga perlu dilakukan pengoptimalan dalam memaksimalkan pendapatan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu agar tidak memiliki ketergantungan yang sangat dominan terhadap dana transfer dari pemerintah.

3.1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan pemerintahan di Kota Bengkulu baik dari aspek pembangunan daerah, pelayanan publik, maupun hal lainnya yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui rasio ini terdapat dua komponen yang dibandingkan yaitu jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan jumlah penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian daerah maka menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer atau bantuan dari pihak eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya.

Realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan eksternal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah menjadi tolak ukur dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah. Data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan total pendapatan eksternal (pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah) Kota Bengkulu terlampir dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah tahun 2018-2021.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sangat kecil jika dibandingkan dengan dana transfer, hal itu sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Antonius S.Sos selaku Sub bidang Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Bengkulu pada hari Rabu, 18 Januari 2023 yang mengatakan bahwa: “Penyebab pendapatan asli daerah Kota Bengkulu kecil dikarenakan potensi yang dimiliki Kota Bengkulu masih dikaji oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan PAD, selain itu Kota Bengkulu memiliki wilayah yang kecil dan penduduk yang sedikit serta kondisi geografisnya yang tidak menjadi sentralistik perekonomian sehingga menjadi faktor dalam menghambat besarnya pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah”. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kota Bengkulu dari tahun 2018-2021:

Tabel 1**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2021**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Tarnsfer (Rp)	Rasio Kemandirian
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	182.884.786.441	914.021.880.424	21,34%
2019	182.798.143.645	987.506.336.281	20,01%
2020	155.149.376.261	924.515.615.812	18,04%
2021	175.336.537.813	969.969.582.108	20,81%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan tabel perhitungan dapat dilihat bahwa rasio kemandirian pada tahun 2018 merupakan angka yang cukup tinggi selama empat tahun terakhir yaitu berada pada persentase 21,34%. Dari hasil perhitungan rasio tersebut dapat dinyatakan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu masih rendah sekali dan memiliki pola hubungan instruktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang memiliki arti bahwa peran dari pemerintah pusat lebih dominan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu sendiri. Rendahnya rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu disebabkan karena pendapatan asli daerah rendah sehingga belum bisa memenuhi belanja daerah untuk menjalankan kegiatan daerah. Hal tersebut membuat peranan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan di Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu dengan menggunakan teori Mahmudi (2019) dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu masih rendah sekali karena tingkat kemandiriannya berada pada interval 0-25%. Kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu belum terbentuk sepenuhnya dan peran dari pemerintah pusat sangat mendominasi dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD masih rendah sekali sehingga penilaian atas kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Bengkulu masih sangat rendah atau dapat dikatakan bahwa daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik. Indikator yang mempengaruhi rasio kemandirian antara lain:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari pengelolaan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan daerah bersumber dari penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menjadi hal yang sangat penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah karena dapat menggambarkan seberapa besar penerimaan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan potensi daerah yang ada. Data target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bengkulu terlampir dalam laporan Keuangan Tahunan tahun 2018-2021.

Berdasarkan dari data terlihat bahwa pada setiap tahunnya antara target PAD yang dianggarkan oleh pemerintah dengan realisasinya masih belum tercapai. Hal ini sangat terlihat pada tahun 2020 dimana pemerintah daerah yang menargetkan penerimaan PAD yang cukup besar dikarenakan pada tahun 2019 realisasi penerimaan PAD melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga membuat pemerintah daerah pada tahun 2020 menargetkan penerimaan PAD yang cukup besar, namun realisasi dari target yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai bahkan penerimaan PAD lebih kecil dari penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan PAD di Kota Bengkulu ini tentunya dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi penerimaan itu sendiri,

sehingga tidak jarang ditemukan selisih antara target yang dianggarkan dengan realisasinya namun hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Septi Mahardini S.T., M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BPKAD Kota Bengkulu pada Hari Senin, 16 Januari 2023 yaitu: “Antara target dan realisasi dari perencanaan anggaran sering tidak sesuai bahkan banyak anggaran yang pada realisasinya tidak mencapai target. Hal ini sering terjadi dalam hal keuangan terutama penerimaan daerah. Ini tentunya disebabkan karena beberapa faktor namun pemerintah daerah selalu berusaha meminimalisir faktor penghambat tersebut sehingga target dapat tercapai dengan baik”.

Pendapatan PAD Kota Bengkulu di dominasi dari penerimaan pajak daerah, namun pajak daerah sendiri masih bersifat fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan hamper setiap tahunnya. Selain terjadi kenaikan dan penurunan, penerimaan pajak daerah juga tidak selalu mencapai dapat target. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan PAD yang dihasilkan karena pajak daerah sumber adalah penerimaan terbesar di Kota Bengkulu, sehingga jika pajak daerah tidak mengalami peningkatan secara terus menerus maka akan sangat memiliki pengaruh terhadap PAD yang dihasilkan oleh Kota Bengkulu. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi unsur dalam penerimaan PAD. Sama halnya dengan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah Kota Bengkulu juga bersifat fluktuatif, terkadang terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Berbeda dengan pajak daerah, realisasi dari penerimaan retribusi daerah selama empat tahun anggaran dari tahun 2018-2021 tidak pernah mencapai target seperti yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan juga bersifat fluktuatif, namun jika hal tersebut dimaksimalkan dengan baik maka akan dapat membantu meningkatkan penerimaan PAD Kota Bengkulu. Unsur penerimaan PAD yang terakhir ialah lain-lain PAD yang sah. Penerimaan dari lain-lain PAD yang sah ini merupakan penyumbang penerimaan PAD terbesar kedua setelah pajak daerah. Sumber lain-lain PAD yang sah ini juga bersifat fluktuatif seperti unsur sumber penerimaan PAD lainnya.

Berdasarkan uraian data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan PAD Kota Bengkulu masih belum maksimal dan jika dilihat dari rata-rata kontribusi PAD kota Bengkulu terhadap pendapatan daerah hanya sebesar 15,49%. Hal ini terjadi dikarenakan unsur sumber penerimaan PAD Kota Bengkulu yang masih mengalami fluktuasi yang jumlahnya cukup banyak sehingga terlihat seperti kurang konsisten dalam mempertahankan capaian realisasinya.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersifat eksternal, dimana pendapatan tersebut diperoleh diluar dari potensi daerah itu sendiri. Transfer pemerintah pusat khususnya dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi hasil. Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah pusat sebagai upaya pendanaan dalam memenuhi kebutuhan dasar dalam wujud penerapan desentralisasi. Sementara itu transfer pemerintah provinsi terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.

Berdasarkan rincian pendapatan transfer diketahui bahwa pendapatan transfer Kota Bengkulu bersifat fluktuatif atau tidak stabil, terkadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Pendapatan transfer tertinggi di Kota Bengkulu selama empat tahun anggaran berada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 913.742.634.220 dan pendapatan transfer terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu hanya sebesar Rp. 842.478.593.772.

Dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu cukup besar ditujukan untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah dan juga besarnya dana perimbangan disebabkan karena banyaknya mandatoris pending yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Badan BPKAD Bapak Yudi Susanda S.STP., M.Si pada Hari Rabu, 18 Januari 2023: “Besarnya dana perimbangan tidak hanya terjadi di Kota Bengkulu saja namun juga terjadi di daerah lainnya. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah dan melihat banyaknya mandatorispending yang diberikan oleh pemerintah pusat. Namun pemerintah daerah sendiri tetap berusaha meningkatkan PAD agar tidak berkegantungan terhadap dana perimbangan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu ditujukan untuk dapat mengurangi kesenjangan fiskal dan juga hal itu disebabkan karena banyaknya mandatorispending yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meskipun dana perimbangan yang diperoleh cukup besar, pemerintah daerah tetap berusaha untuk meningkatkan PAD agar tidak bergantung terhadap dana perimbangan.

3.1.2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui gambaran kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah yang efektif dalam kemampuan keuangannya jika daerah tersebut mampu mencapai rasio efektivitas 100%. Rasio efektivitas ini menunjukkan bagaimana kinerja pemerintah dalam mencapai target pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan kondisi riil daerah tersebut. Hal ini dapat diartikan jika semakin tinggi angka rasio efektivitas maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut. Melakukan analisis efektivitas dapat mengetahui seberapa besar realisasi penerimaan PAD terhadap target yang dianggarkan pada tahun anggaran tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi penerimaan PAD, hal tersebut diharapkan dapat mendorong kinerja pemerintah daerah untuk mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa keefektifitasan pengelolaan PAD masih tidak stabil. Agar lebih jelas hasil perhitungan tersebut dicantumkan pada tabel seperti berikut :

Tabel 2
Perhitungan Rasio Efektivitas Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	192.543.390.250	182.884.786.441	94,98%
2019	176.390.125.327	182.798.143.645	103,63%
2020	233.369.479.182	155.149.376.261	66,48%
2021	208.775.296.312	175.336.537.813	83,98%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat gambaran rasio efektivitas pemerintah daerah Kota Bengkulu selama empat tahun anggaran yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 103,63% dimana pada tahun tersebut efektivitas PAD Kota Bengkulu tergolong sangat efektif karena berada pada skala interval >100% sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019). Rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 66,48% dimana pada tahun tersebut efektivitas PAD Kota Bengkulu tergolong tidak efektif karena berada pada skala interval <75% sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019) dan untuk rata-rata rasio efektivitas selama empat

tahun anggaran yaitu sebesar 87,27%. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas, tingkat efektivitas kinerja keuangan Kota Bengkulu dalam merealisasikan pendapatan asli daerah selama empat tahun anggaran yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 termasuk dalam kriteria kurang efektif dengan skala interval 75-89%, sesuai dengan skala interval rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kota Bengkulu Bapak Toharudin S.T pada Hari Rabu, 18 Januari 2023: “Bahwa efektivitas tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi daerah melainkan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan oleh sumber daya yang ada. Masih kurangnya SDM yang kompeten dan belum mampu mengelola beberapa sektor menyebabkan PAD dari Kota Bengkulu masih kurang efektif. Sehingga Kota Bengkulu dapat menyediakan aparatur yang berkompeten di bidang keuangan daerah, mengurangi biaya dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan di daerah, serta menggali lebih banyak lagi sumber pendapatan asli daerah.”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya potensi yang dimiliki daerah tetapi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang ada. Daerah yang mempunyai potensi daerah yang besar tidak akan bisa berkembang jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia dengan baik, oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara potensi dengan sumber daya manusianya.

a. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari kekayaan asli yang dimiliki oleh daerah. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tidak selalu sesuai dengan target yang dianggarkan. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah masih bersifat fluktuatif meskipun cenderung mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Antonius S.Sosselaku Sub Bidang Perencanaan dan penyusunan anggaran yaitu: “Kota Bengkulu dalam pengelolaan pendapatan asli daerah cukup baik meskipun realisasinya sering tidak sesuai dengan yang telah ditargetkan, namun setiap tahunnya pendapatan asli daerah yang diperoleh terus meningkat walau tidak banyak”. Pendapatan asli daerah Kota Bengkulu cenderung meningkat setiap tahunnya meskipun peningkatan yang terjadi tidak pesat, namun jika hal tersebut terjadi secara terus menerus dapat membuat realisasi dari pendapatan asli daerah tercapai sepenuhnya dan jika hal itu terjadi maka membuktikan bahwa pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sudah dilakukan dengan baik

b. Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Target penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebuah capaian anggaran yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Target ini dibuat berdasarkan perkiraan dari anggaran dan juga realisasinya pada tahun sebelumnya dan juga dilihat dari potensi daerah yang dimiliki. Berikut penjelasan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu bapak Yudi Susanda S.STP., M.Si: “Pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam membuat target anggaran setiap tahunnya tidak selalu meningkat, hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dan juga melihat potensi daerah untuk tahun berikutnya, akankah ada kemungkinan untuk membuat penerimaan pendapatan asli daerah besar atau tidak.”

Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi alasan dari target penerimaan pendapatan asli daerah yang naik turun karna disebabkan penyesuaian terhadap realisasi tahun sebelumnya dan juga melihat kemampuan potensi daerah untuk tahun berikutnya. Penargetan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah ini diharapkan mampu mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan yang tinggi.

3.1.3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan untuk belanja daerah berdasarkan total realisasi pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan belanja daerah dengan penerimaan daerah. Menentukan hasil rasio efisiensi keuangan suatu daerah akan memperkuat penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efisien jika suatu produk dapat dicapai dengan sumber daya dan dana seminimum mungkin. Sehingga untuk melakukan pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Melalui rasio efisiensi dapat diketahui seberapa besar efisiensi belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Bengkulu.

Tabel 3

Perhitungan Rasio Efisiensi Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	1.035.960.297.263	1.096.906.666.865	94,44%
2019	1.133.892.824.539	1.170.304.479.927	96,89%
2020	1.279.848.646.237	1.079.664.992.073	118,54%
2021	1.076.543.915.474	1.145.295.835.182	93,99%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah Kota Bengkulu dalam empat tahun anggaran dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif. Tingkat efisiensi keuangan daerah Kota Bengkulu berdasarkan perhitungan di atas termasuk dalam kriteria tidak efisien, yang memiliki arti bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk membiayai keseluruhan belanja daerah masih belum efisien karena total belanja daerah melebihi total realisasi penerimaan daerah. Kemudian untuk rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kota Bengkulu selama empat tahun anggaran yaitu sebesar 100,97% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien. Sehingga dapat disimpulkan agar pengelolaan keuangan daerah menjadi efisien ialah melakukan pengendalian belanja dengan memprioritaskan kegiatan atau hal lainnya yang lebih dibutuhkan pada tahun tersebut, menurunkan target belanja daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, serta memfokuskan penggunaan anggaran pendapatan daerah untuk hal yang dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan

a. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah merupakan sebuah pencapaian terhadap pengeluaran yang telah dilakukan daerah pada tahun tersebut. Belanja daerah adalah kewajiban setiap daerah untuk melakukan pengeluaran selama penyelenggaraan pemerintahan berjalan. target belanja daerah Kota Bengkulu selalu mengalami kenaikan meskipun di tahun 2021 target belanja daerah tidak terlalu besar seperti tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah selama empat tahun anggaran paling tinggi berada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.279.848.646.237. Belanja daerah Kota Bengkulu selalu mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Bapak Toharudin S.T selaku Kepala Bidang perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kota Bengkulu: "Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan berdasarkan SPM, pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan. Selain itu belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional dan pengembangan sarana dan prasarana. Hal ini yang menyebabkan belanja daerah selalu meningkat setiap tahunnya”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya belanja daerah yang terjadi disebabkan karena kewajiban dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan belanja untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang besarnya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, selain itu belanja daerah juga dilakukan untuk kegiatan operasional dan pengembangan sarana dan prasarana.

b. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan pada suatu daerah. Perkembangan pendapatan daerah Kota Bengkulu terutama dari tahun 2018-2021 dapat dilihat pada data Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Bengkulu. Berdasarkan lampiran di laporan keuangan tahun 2018-2021 terlihat bahwa pendapatan daerah Kota Bengkulu bersifat fluktuatif, Penjelasan dari Ibu Erda Agustina S.P selaku Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 yaitu: ”Melihat pendapatan daerah yang tidak mencapai target dan naik turun setiap tahunnya membuat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu berupaya memaksimalkan pengoptimalan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan PAD, dengan meningkatnya PAD nanti diharapkan dapat juga ikut meningkatkan total pendapatan daerah meskipun tidak banyak”.

Pendapatan daerah yang tidak stabil dan sumber penerimaan pendapatan daerah yang belum mencapai target membuat pemerintah daerah berupaya memaksimalkan kinerja dalam mengoptimalkan potensi yang ada di daerah, karena salah satu unsur penerimaan daerah yang dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pemaksimalan dalam mengoptimalkan potensi daerah yang ada diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD.

3.1.4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara maksimal. Semakin rendah persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin besar, begitupun sebaliknya.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi terhadap total belanja daerah. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga memiliki sifat jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu sebesar 60-90%. Dari perhitungan rasio belanja operasi terlihat bahwa persentase rasio keserasian belanja operasi pemerintah daerah cukup besar. Belanja operasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif. Begitu juga untuk belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Bengkulu setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan.

b. Rasio belanja modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan belanja daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5- 20%. Rasio belanja modal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran

Pemerintah Kota Bengkulu untuk membiayai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan di Kota Bengkulu. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagian kecil dana yang dimiliki dialokasikan untuk kebutuhan belanja modal. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Antonius S.Sos selaku Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran BPKAD Kota Bengkulu pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 yaitu: “Pemerintah Daerah Kota Bengkulu pada setiap tahun menganggarkan belanja operasi dalam APBD dengan porsi yang cukup besar agar dapat membiayai kebutuhan rutin pegawai demi menunjang kinerja pemerintah daerah, sedangkan untuk belanja modal yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur daerah tidak sebesar belanja operasi tapi dari tahun ke tahun harus tetap mengalami kenaikan untuk membiayai infrastruktur daerah demi kesejahteraan masyarakat”.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bengkulu kurang mengutamakan penyediaan sarana prasarana pembangunan ekonomi daerahnya. Rasio keserasian Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih mengutamakan belanja operasi yaitu belanja rutin. Akan tetapi belanja modal yaitu belanja pembangunan sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah mulai memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana ekonomi masyarakatnya.

3.1.5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan realisasi anggaran yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya. Rasio ini mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerah, belanja, dan transfer dengan membandingkan realisasi tahun anggaran berjalan dikurangi realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dapat mempertahankan ataupun meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan PAD Kota Bengkulu bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran Pemerintah Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat rendah, yang berarti Pemerintah Daerah Kota Bengkulu belum dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 4

Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	PAD x_n (Rp)	PAD x_{n-1} (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	182.884.786.441	170.925.293.841	6,99%
2019	182.798.143.645	182.884.786.441	-0,04%
2020	155.149.376.261	182.798.143.645	-15,12%
2021	175.336.537.813	155.149.376.261	13,01%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas pertumbuhan PAD Kota Bengkulu bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 sebesar 6,99% selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi -

0,04%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang sangat besar yaitu menjadi -15,12% dan mengalami kenaikan yang cukup banyak pada tahun 2021 yaitu menjadi 13,01%. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran Pemerintah Kota Bengkulu mengalami pertumbuhan pendapatan yang sangat rendah, yang berarti Pemerintah Daerah Kota Bengkulu belum dapat mempertahankan atau meningkatkan pendapatan asli daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Rasio pertumbuhan belanja daerah mengukur sejauh mana pemerintah daerah mempertahankan serta meningkatkan belanja daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam hal ini masyarakat Kota Bengkulu.

Tabel 5

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	Belanja x_n (Rp)	Belanja x_{n-1} (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	1.035.960.297.263	1.113.568.925.773	-6,96%
2019	1.133.892.824.539	1.035.960.297.263	9,45%
2020	1.279.848.646.237	1.133.892.824.539	12,87%
2021	1.076.543.915.474	1.279.848.646.237	-15,89%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja daerah di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa tahun 2018 terjadi penurunan yang menunjukkan angka negatif menjadi -6,96% yang berarti kinerja pemerintah masih belum baik, kemudian pada tahun 2019 rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan yaitu menjadi 9,45%. Kenaikkan ini tidak sejalan dengan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang menurun pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2020 rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan kembali menjadi 12,87% kenaikan pada tahun ini sejalan dengan perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah yang mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi -15,89%, hal ini menunjukkan angka negatif yang berarti kinerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih belum konsisten.

c. Rasio Pertumbuhan Transfer Daerah

Rasio pertumbuhan transfer daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bengkulu yaitu mengukur pertumbuhan dana transfer yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah provinsi selama tahun 2018 hingga tahun 2021.

Tabel 6

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Transfer Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018-2021

Tahun	Transfer x_n (Rp)	Transfer x_{n-1} (Rp)	Rasio Pertumbuhan Transfer
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	856.865.595.899	875.138.553.916	-2,08%
2019	913.742.634.220	856.865.595.899	6,63%
2020	859.912.855.994	913.742.634.220	-5,89%
2021	842.478.593.772	859.912.855.994	-2,02%

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan transfer daerah Kota Bengkulu tersebut menunjukkan bahwa tiap tahunnya yang terjadi mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun 2018 hingga pada tahun 2021, bahkan pada tahun 2019 mencapai angka 6,63%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -5,89% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi -2,02% yang berarti kinerja Pemerintah Kota Bengkulu semakin membaik. Diharapkan untuk rasio pertumbuhan pendapatan transfer pada tahun selanjutnya untuk mencapai angka yang stabil ataupun tidak menyentuh angka negative. Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan, penulis mengambil kesimpulan bahwa Kota Bengkulu harus bisa meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mencapai target pertumbuhan angka yang signifikan di tahun-tahun berikutnya.

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah memberikan sebuah tanggungjawab kepada daerah otonomi untuk mampu meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri sehingga hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Namun kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah otonom atau hampir seluruh daerah di Indonesia belum mampu dikatakan mandiri atau belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Untuk meningkatkan nilai tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta menjadi harapan bagi setiap pemerintah daerah. Namun dalam mencapai hal tersebut tidaklah mudah dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkup pemerintah daerah Kota Bengkulu itu sendiri.

a. Pendapatan Asli Daerah yang rendah

Dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian daerah yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian Kota Bengkulu masih dalam kategori rendah sekali, ini memiliki arti bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum baik, hal ini akibat dari pemerintah daerah yang kurang menggali potensi daerah yang ada serta kelalaian dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Sub Koordinator Sub Sustansi Evaluasi Anggaran Ibu Erda Agustina S.P pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 beliau menjelaskan bahwa: “Seperti yang diketahui bersama realisasi penerimaan PAD yang masih minim maupun realisasi belanja yang kurang dari target merupakan hal yang selalu ditemukan pada pemerintah daerah. Di Kota Bengkulu sendiri realisasi penerimaan PAD kecil dikarenakan potensi daerah yang dimiliki masih banyak yang belum dikelola maksimal dan Kota Bengkulu sendiri bukan merupakan kawasan strategis. Selain itu penerimaan PAD yang minim disebabkan oleh pembahasan dalam penyusunan anggaran yang memakan waktu cukup lama sehingga waktu pelaksanaan setiap kegiatan semakin mundur sehingga menyebabkan penyelesaiannya pun terkadang harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain itu pada setiap tahunnya terkadang ada beberapa kejadian yang tak terduga seperti bencana alam dan sebagainya sehingga menyebabkan rancangan kegiatan menjadi kacau.”

Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan rasio yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian Kota Bengkulu masih tergolong rendah sekali yang berarti kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum baik, hal ini diakibatkan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal dalam menggali potensi daerah yang ada serta kelalaian dalam tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu berdasarkan pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan yang kurang matang serta faktor alam maupun kondisi sosial masyarakat menjadi

faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah.

b. Ketergantungan terhadap dana perimbangan

Ketergantungan Pemerintah Kota Bengkulu terhadap dana perimbangan menjadi faktor penghambat eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah dikarenakan transfer pemerintah pusat atau provinsi memberikan kontribusi yang lebih dominan dibandingkan dengan PAD Kota Bengkulu. Mandatorispending merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bagian yang tergabung ke dalam mandatorispending ini yaitu sektor pendidikan, sektor kesehatan, DAU, DAK, dan DBH. Setiap bagian yang tergabung dalam mandatorispending ini memiliki besaran persentase yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Terkait hal tersebut Kepala Badan BPKAD Kota Bengkulu Bapak Yudi Susanda S.STP., M.Si pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 menyatakan bahwa: "Ketergantungan terhadap dana perimbangan menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Ini sebagai suatu hal yang sering dihadapi karena terjadi pada setiap tahunnya, ditambah dengan mandatorispending dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah Kota Bengkulu beranggapan bahwa bagaimanapun keadaan keuangan yang terjadi maka pemerintah daerah harus tetap mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Namun, pada penyelenggarannya pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan PAD sehingga dapat meningkatkan total pendapatan daerah serta menurunkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Bengkulu.

Dengan adanya pengeluaran untuk mandatorispending menyebabkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota Bengkulu terhadap dana perimbangan cukup tinggi mengingat pendapatan asli daerah kota Bengkulu yang tergolong rendah. Meskipun hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk membiayai daerah, namun pemerintah daerah Kota Bengkulu tetap memiliki kewajiban untuk meningkatkan PAD agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan.

3.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah Kota Bengkulu

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kota Bengkulu:

a. Pengoptimalan Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan efisiensi PAD ialah dengan menggunakan cara yang populer dan sering digunakan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana intensifikasi ialah tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan PAD dengan cara mengintensifikasi atau peningkatan untuk memaksimalkan sumber penerimaan yang sudah ada sedangkan ekstensifikasi merupakan usaha meningkatkan jumlah penerimaan PAD dengan menambah sumber penerimaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Halim yang mengatakan bahwa Secara teoritis upaya memobilisasi PAD melalui pola intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Usaha intensifikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menurut Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BPKAD Kota Bengkulu Ibu Septi Mahardini S.T.,M.Si pada Hari Senin, 16 Januari 2023 yaitu: "Hal yang dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah Kota Bengkulu yaitu dengan mengintensifkan penerimaan pajak yang sudah ada sebagai contoh ialah dengan melakukan evaluasi dan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak. Sehingga hal yang diharapkan pemungutan pajak di Kota Bengkulu berjalan secara optimal dan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu”.

Peningkatan besaran dan cakupan pajak daerah yang dilakukan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah merupakan suatu kegiatan yang efektif untuk meningkatkan PAD guna meningkatkan kinerja keuangan daerah. Akan tetapi dalam melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih akan tetap menyesuaikan dengan potensi pajak yang dimiliki dan mengukur kemampuan dari para wajib pajak. Pemerintah daerah Kota Bengkulu di tahun berikutnya akan mengupayakan penerimaan Pajak Daerah sebagai usaha terakhir yang diberikan dalam mengembangkan kemandirian keuangan daerah Kota Bengkulu dengan melalui peningkatan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil Kota Bengkulu.

b. Melakukan pengeluaran belanja daerah dengan prioritas anggaran

Belanja daerah merupakan kegiatan rutin pemerintah daerah setiap tahunnya. Selain itu pemerintah daerah juga memiliki tanggungan yang cukup besar dalam pengeluaran untuk mandatorispending dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam melakukan pengeluaran atau belanja daerah perlu dilakukan berdasarkan prioritas belanja agar tidak banyak dana yang keluar untuk pengeluaran yang tidak cukup mendesak pada tahun anggaran tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibu Erda Agustina S.P selaku Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Hari Rabu, 18 Januari 2023 yaitu: “Dalam melakukan pengeluaran ataupun belanja daerah pemerintah sedang berupaya mengeluarkan anggaran berdasarkan prioritas anggaran. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi pengeluaran daerah yang cukup besar pada setiap tahunnya. Karena seperti yang kita ketahui pengeluaran Kota Bengkulu sendiri cukup besar dibandingkan dengan pendapatan daerah, selain itu adanya mandatorispending dari pemerintah pusat juga menjadi alasan pengeluaran daerah cukup besar”.

Besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dan mandatorispending dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah Kota Bengkulu mengupayakan berbagai hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan terhadap dana perimbangan. Hal yang diupayakan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu ialah dengan membuat prioritas anggaran dan mengeluarkan atau melakukan belanja daerah berdasarkan prioritas tersebut. Ini dimaksudkan agar hal-hal yang mendesak pada tahun anggaran tersebut dapat terpenuhi dan yang belum cukup mendesak tidak perlu dikeluarkan pada tahun anggaran tersebut, sehingga pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu terlalu besar setiap tahun dan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan yakni kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bengkulu provinsi Bengkulu tergolong rendah sekali dan tidak efisien. Hal ini tentunya berbeda dengan riset yang dilakukan Agus dimana Agus memberikan hasil bahwa kinerja keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik. Kinerja keuangan di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan riset yang dilakukan Novira memberikan hasil cukup efisien dalam mengelola keuangan. Sehingga perlunya dilakukan upaya bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kinerja Laporan Keuangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu melalui data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder serta hasil wawancara yang telah dilakukan, maka penulis

mendapatkan kesimpulan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dari hasil analisis rasio Kemandirian Keuangan Kota Bengkulu berada pada angka rata-rata 18,35%. Hal ini menunjukkan bahwakemampuan Kota Bengkulu masih rendah sekali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dari hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan PAD Kota Bengkulu berada pada angka rata-rata 87,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah cukup efektif. Hasil analisis rasio efisiensi pengelolaan PAD Kota Bengkulu berada pada angka rata-rata 100,97%. Hal ini menunjukkan tidak efisiensinya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam mengelola pendapatan asli daerah. Hasil analisis rasio keserasian belanja Kota Bengkulu dalam kurunwaktu empat tahun anggaran menunjukkan bahwa rata-rata rasio belanja operasi Kota Bengkulu sebesar 86,22% dan rata-rata rasiobelanja modal Kota Bengkulu sebesar 19,24%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. Hasil analisis rasio pertumbuhan PAD, belanja daerah, dan transfer Kota Bengkulu dalam empat tahun terakhir bersifat fluktuatif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 4th ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fatmawati, Triska Omega. 2020. —Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset dan akuntansi* 9(4).<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2850/2860>.
- Dwirandra, kadek martini &. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi BelanjaModal di Provinsi Bali*.
- Sartiika, N. (2019). *Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti*.
- Sulistyo, Agus Tri. 2018. —Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik* Vol.3(1)43–59.<https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/22/15>.
- Zulkarnain, Lala Novikasari &. 2020. —Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3(2). <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/issue/view/61>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahDaerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah